

**IMPLEMENTASI FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT BERBASIS
KELAPA SAWIT DI DESA PONDOK DAMAR, KECAMATAN MENTAYA HILIR
UTARA, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(Studi pada PT. Mustika Sembuluh)**

Regi Pramono

NPP. 30.0933

*Asdaf Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: regipramono7@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the lack of optimal implementation of facilitating the development of oil palm-based community gardens. **Purpose:** The aim of this study was to determine the implementation of facilitating the development of oil palm-based community gardens in Pondok Damar village, Mentaya Hilir Utara district, Kotawaringin Timur district, Central Kalimantan province, the inhibiting and supporting factors, and efforts to overcome these inhibiting factors. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative approach, and data collection by observation, interviews, and documentation. Analysis with reduction stages, data presentation, and drawing conclusions. **Results/Findings:** The implementation of this policy has not been maximized, the inhibiting factors are overlapping policies, the community's readiness is still lacking, and the process of permitting land is complicated. **Conclusion:** The implementation of this policy has not been maximized, due to overlapping policies, lack of community preparedness, and a complicated land licensing process. Efforts that can be made are to clarify the rules, then make strict rules for cooperative members, for limited land they can take land that has been cultivated by the company or use community-owned land. In order to maximize the Facilitation of Community Garden Development, the Government can carry out outreach, and review reports from companies regarding the Facilitation of Community Garden Development and take strict action against those who do not implement it, as well as carry out assistance regarding the Facilitation of Community Garden Development, then review related land issues.

Keywords: *Implementation, Community Garden, Palm oil*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan kurang maksimalnya implementasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat berbasis kelapa sawit. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Berbasis Kelapa Sawit Di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, faktor penghambat dan pendukung, serta upaya dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis

dengan tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Implementasi kebijakan ini belum maksimal, faktor penghambatnya adalah terjadinya tumpang tindih kebijakan, kesiapan masyarakat masih kurang, dan proses perizinan lahan yang rumit. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan ini belum maksimal, dikarenakan terjadinya tumpang tindih kebijakan, kesiapan masyarakat masih kurang, dan proses perizinan lahan yang rumit. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperjelas aturan, kemudian membuat aturan tegas bagi anggota koperasi, untuk keterbatasan lahan dapat mengambil lahan yang telah digarap perusahaan atau menggunakan lahan milik masyarakat. Untuk memaksimalkan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, Pemerintah dapat melaksanakan sosialisasi, dan meninjau ulang laporan dari perusahaan terkait Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat dan menindak tegas yang tidak melaksanakan, serta melaksanakan pendampingan terkait Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, kemudian meninjau ulang terkait permasalahan lahan.

Kata kunci: Implementasi, Kebun Masyarakat, Kelapa Sawit

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sub-sektor pertanian, dimana tercatat presentase tenaga informal sector pertanian sebesar 88,57% pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 sebesar 88,43% dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 88,89% (Badan Pusat Statistik, 2023). Sektor pertanian di Indonesia pada umumnya terbagi menjadi dua jenis berdasarkan skala per 1 meter, yaitu perkebunan besar baik milik negara maupun perusahaan swasta, dan produksi petani kecil. Perkebunan besar biasanya lebih fokus kepada komoditas ekspor seperti minyak sawit dan karet, sedangkan produksi petani kecil lebih cenderung fokus pada komoditas hortikultura untuk kebutuhan pokok pangan seperti beras, kedelai, jagung, buah-buahan, dan sayuran.

Pada akhir 2018, luas lahan Kebun Masyarakat di Indonesia 617.000 hektare. Padahal, luas areal perkebunan sawit perusahaan besar pada 2018 adalah 8.507.462 hektare (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, 2020). Seharusnya, bila dihitung secara kasar, luas areal Kebun Masyarakat sudah mencapai 1.701.492 hektar. Untuk mendorong pertumbuhan industri sawit yang inklusif, kebijakan pembangunan kebun sawit Kebun Masyarakat penting agar pembangunan perkebunan sawit tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi, karena manfaat industri sawit dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat di perkebunan sawit.

Kalimantan Tengah adalah lima dari provinsi terbesar yang memproduksi kelapa sawit, dan mayoritasnya adalah penghasil komoditas perkebunan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2019 luas tanaman perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah seluas 1.922.100 hektare, sedangkan tahun 2020 seluas 2.018.700 hektare, dan pada tahun 2021 seluas 1.815.600 hektare (Badan Pusat Statistik, 2022).

Industri sawit tidak bisa lepas dari namanya Kebun Masyarakat, meskipun tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan negara, namun kebun Kebun Masyarakat secara langsung dinikmati rakyat sebagai petani. Undang Undang No. 39 Tahun 2014 telah mengamanatkan perusahaan perkebunan wajib untuk memfasilitasi pembangunan Kebun Masyarakat paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan.

Desa Pondok Damar merupakan salah satu desa yang terletak berdekatan dengan kawasan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh yang merupakan anak perusahaan Wilmar Group. Desa Pondok Damar mempunyai peran penting dalam pembangunan kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh, karena banyak lahan milik masyarakat dan kawasan hutan di Desa Pondok Damar kemudian dialih fungsikan dalam pembukaan kebun kelapa sawit PT. Mustika

Sembuluh ini. Oleh karena itu perusahaan PT. Mustika Sembuluh mempunyai kewajiban dalam memfasilitasi pembangunan Kebun Masyarakat sebagai kompensasi guna menjaga kestabilan, serta untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Pondok Damar ini.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Implementasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Berbasis Kelapa Sawit. Pada akhir 2018, luas lahan Kebun Masyarakat di Indonesia 617.000 hektare. Padahal, luas areal perkebunan sawit perusahaan besar pada 2018 adalah 8.507.462 hektare (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, 2020). Seharusnya, bila dihitung secara kasar, luas areal Kebun Masyarakat sudah mencapai 1.701.492 hektar.

Data ini menunjukkan bahwa implementasi pembangunan kebun masyarakat berbasis kelapa sawit di Indonesia masih kurang, sehingga untuk mendorong pertumbuhan industri sawit yang inklusif, kebijakan pembangunan kebun sawit Kebun Masyarakat penting agar pembangunan perkebunan sawit tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi, karena manfaat industri sawit dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat di perkebunan sawit.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat maupun konteks pola kemitraan kebun masyarakat. Penelitian Ndan Imang, Siti Balkis, dan Maliki berjudul Analisis Implementasi Pola Kemitraan dan Pendapatan Petani Kebun Masyarakat Kelapa Sawit di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan timur (Ndan Imang, Siti Balkis, dan Maliki 2016), menemukan bahwa Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pola kemitraan antara petani kebun Kebun Masyarakat kelapa sawit dengan Perusahaan PT. Kaltim Hijau Makmur dan PT. Kutai Agro Lestari berupa pola kemitraan Inti-Kebun Masyarakat. Sedangkan pendapatan rata-rata petani Kebun Masyarakat Kampung Sambung Kecamatan Bentian Besar Rp. 121.992/ha. Pendapatan rata-rata petani Kebun Masyarakat kelapa sawit Kampung Suakong sebesar Rp. 1.264.042/ha. Pendapatan di Kampung Sambung lebih besar dibandingkan Kampung Suakong karena biaya transportasi dari kebun ke pabrik yang relatif sangat mahal karena jalan yang rusak dan jarak yang jauh 40 km.. Penelitian Syarah Naifuli dkk Juita Berjudul Analisis Kemitraan Petani Kebun Masyarakat Kelapa Sawit pada PT. Cahaya Anugerah Plantation di Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara menemukan Implementasi kemitraan yang terjalin tidak berjalan dengan baik. manfaat dari adanya kemitraan ini yaitu adanya lapangan pekerjaan, mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah seluas 2 ha dari kebun binaan yang dikelola setelah lunas, petani mitra mendapatkan dana Kebun Masyarakat dengan syarat memiliki kartu anggota Kebun Masyarakat (Syarah Naifuli, Ndan Imang, Firda Juita , 2017). Penelitian Triani berjudul Implementasi Program Perusahaan Inti Rakyat kredit Koperasi Primer Anggota (Kkpa) Terhadap Pendapatan Anggota Petani Kebun Masyarakat Kelapa Sawit (Studi Kasus: Koperasi Unit Desa Cahaya Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal) menemukan bahwa Implementasi program inti rakyat kredit koperasi primer anggota berjalan dengan baik. Kemitraan antara KUD Cahaya dengan PT. Sago Nauli dengan menggunakan program KKPA dikategorikan berhasil karena memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (Triani, 2020). Penelitian Jimmy .N selanjutnya berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan) menemukan bahwa faktor komunikasi sudah berjalan dengan baik dan

faktor struktur birokrasi dapat dikatakan cukup faktor sumberdaya masih memiliki keterbatasan dan faktor disposisi masih memiliki kekurangan, serta ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. (Jimmy .N, 2013). Berdasarkan hasil penelitian Adrianus Victor dkk tentang Analisis Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Kebun Masyarakat Kelapa Sawit Pada PT. Agronusa Investama Di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, penulis menemukan Tahapan kesejahteraan keluarga petani memiliki hubungan yang cukup kuat dengan umur petani, pengalaman dan umur tanaman kelapa sawit. sedangkan hubungan antara pendidikan petani dengan kesejahteraan sangat kuat. (Adrianus Victor dkk, 2018).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni melihat implementasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dari sisi teknis pelaksanaan dan kepatuhan perusahaan, metodenya yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Merilee S. Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan sebuah implementasi sangat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas isi kebijakan (*Content of Policy*) dan konteks kebijakan (*Context of Policy*).

Tujuan.

Untuk mengetahui implementasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat berbasis kelapa sawit di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Studi pada PT. Mustika Sembuluh) dan faktor yang menghambat dan mendukung, serta upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat

II. METODE

Dalam penelitian dengan teori implementasi menurut Merillee S. Grindle, peneliti menggunakan metode deskriptif, dimana melalui metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara utuh dan jelas bagaimana situasi di lapangan. Kemudian peneliti melakukan pengamatan dan/atau menganalisis data dengan pendekatan induktif, Penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif berasal dari hasil penjelajahan suatu fakta di lapangan yang kemudian dirumuskan dan dihubungkan dengan teori yang relevan sehingga dihasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan 9 (Sembilan) indikator menurut teori Merilee S. Grindle, peneliti akan menganalisis apakah Implementasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di PT. Mustika Sembuluh dan Desa Pondok Damar, Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah)

4.2.1.1 Isi Kebijakan

4.2.1.1.1 Kepentingan Yang Mempengaruhi

Suatu kebijakan dibuat berdasarkan oleh isu-isu yang berkembang di masyarakat, yang kemudian dinilai penting sehingga harus dibuat kebijakan tersebut. Oleh karena itu, setiap kebijakan pasti dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan, tidak terlepas kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara di atas, terdapat masih adanya perbedaan persepsi antara pihak koperasi, pemerintah desa, dan perusahaan. Dimana, kewajiban Kebun Masyarakat ini masih terhambat karena di satu pihak mereka mengaku belum berkewajiban membangun kebun Kebun Masyarakat dan baru bisa membangun setelah pembaharuan IUP

4.2.1.1.2 Manfaat Yang Akan Dihasilkan

Dengan adanya pembangunan Kebun Masyarakat kelapa sawit, diharapkan tercapainya kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan pendapatan ekonomi khususnya masyarakat di Desa Pondok Damar. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka diharapkan bisa membawa dampak yang baik terhadap tingkat pendidikan dan kesehatan di Desa Pondok Damar. peneliti melihat bahwa baik pihak perusahaan, pihak pemerintah desa dan pihak koperasi menyampaikan bahwa kebijakan program kebun Kebun Masyarakat ini dapat membawa perubahan yang baik dan harapannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Pondok Damar. Hal ini juga nantinya pasti akan membawa manfaat yang baik bagi masa depan di generasi berikutnya, jika tidak ada kendala terhadap kemitraan ini.

4.2.1.1.3 Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Dengan adanya Kebun Masyarakat ini diharapkan tidak hanya meningkatnya pendapatan masyarakat, tapi diharapkan juga dapat memberi dampak yang baik bagi Desa Pondok Damar kedepannya. masyarakat desa dan perangkat desa sekalipun berharap banyak terhadap adanya fasilitasi pembangunan Kebun Masyarakat kelapa sawit ini, dimana mereka menganggap bahwa adanya Kebun Masyarakat kelapa sawit ini dapat membawa dampak yang baik kedepannya

4.2.1.1.4 Letak Pengambilan Keputusan

Sejauh pengamatan peneliti, Kebijakan ini diambil karena di Kabupaten Kotawaringin sendiri memang banyak sekali perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang hampir Sebagian besar wilayah pelosok dan desa itu ada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sehingga kebijakan fasilitasi pembangunan Kebun Masyarakat kelapa sawit ini sudah tepat, karena melihat dampak dari adanya perkebunan kelapa sawit ini yang menghabiskan hutan dimana masyarakat dulunya memanfaatkan hutan tersebut sebagai mata pencaharian dan memenuhi kebutuhan pokok mereka.

4.2.1.1.5 Pelaksana Program

PT. Mustika Sembuluh sebagai Perusahaan Besar Swasta Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Desa Pondok Damar, adalah pihak yang wajib melaksanakan program fasilitasi pembangunan Kebun Masyarakat dengan berdasarkan Permentan No.18 tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, dan Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No. 20 Tahun 2012 tentang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan

4.2.1.1.6 Sumber Daya yang Digunakan

a. Tenaga Manajemen Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit PT.Mustika Sembuluh

Tataran manajemen di dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar berada dalam Departemen Community Development (CD) dan Kebun Masyarakat . Departemen Community Development (CD) dan Kebun Masyarakat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan controlling, evaluasi dan negosiasi kepada masyarakat di Desa Pondok Damar dalam pelaksanaan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. tenaga manajemen di Departemen Community Development (CD) dan Kebun Masyarakat merupakan tenaga yang memiliki kualifikasi yang baik dalam melaksanakan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar.

b. Tenaga Teknis Pembangunan dan Pengembangan Program Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mustika Sembuluh

Pada tataran teknis dalam pembangunan dan pengembangan program kemitraan perkebunan kelapa sawit dimaknai sebagai pelaksana pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang memiliki tugas untuk melakukan penanaman pohon kelapa sawit pada lahan perkebunan Kebun Masyarakat di Desa Pondok Damar dan melakukan perawatan serta pemupukan pada perkebunan Kebun Masyarakat tersebut.

c. Pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama Pengurus

Koperasi Bitu Maju Bersama tentunya masuk dalam tataran teknis dan manajemen dalam pelaksanaan program kemitraan perkebunan kelapa sawit di Desa Pondok Damar. pengurus Koperasi Bitu Maju Bersama memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai program kemitraan perkebunan Kebun Masyarakat yang dibina oleh perusahaan PT. Mustika Sembuluh

4.2.1.2 Konteks Kebijakan

4.2.1.2.1 Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat

Pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini, pasti ada saja kendala sehingga Program Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat tidak maksimal. Sejauh dari yang peneliti amati, pemerintah sudah cukup membantu dalam proses pengajuan pembangunan kebun Kebun Masyarakat ini. Tetapi yang masih kurang dari pemerintah adalah belum adanya sosialisasi kepada masyarakat dan pihak perusahaan terkait Kebijakan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat ini khususnya sosialisasi ke masyarakat desa yang banyak perusahaan kelapa sawitnya. Sejauh ini pemerintah hanya menanggapi apabila ada aduan atau pengajuan dari masyarakat.

4.2.1.2.2 Karakteristik atau rejim yang berkuasa

Kepala Daerah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, hal ini karena kepala daerah mempunyai kekuatan dan kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga terlaksana atau tidaknya kebijakan tersebut bisa dikatakan tergantung kepala daerah yang menjabat saat itu. Sejauh pengamatan peneliti, kepala daerah saat ini khususnya Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, mendukung penuh terhadap terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pondok Damar. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan beliau yang mengharuskan pihak perusahaan memberikan Dana Tunggu kepada Koperasi Itah Belum Hapakat

4.2.1.2.3 Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana

Pihak perusahaan PT. Mustika Sembuluh memang selalu menyambut baik niatan masyarakat yang ingin mengajukan Kebun Masyarakat, hanya saja kurang dalam pelaksanaannya. Permentan Nomor 98 tahun 2013 pasal 40 ayat 1 huruf f menyebutkan bahwa memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun. Tetapi faktanya masih banyak perusahaan yang belum membuat kebun Kebun Masyarakat sesuai dengan aturan tersebut. Alasan pihak perusahaan mengapa tidak maksimalnya pembangunan Kebun Masyarakat terkendala kekurangan lahan dan juga kebijakan dari dinas terkait yang berlawanan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Berbasis Kelapa Sawit di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Studi pada PT. Mustika Sembuluh) berdasarkan teori Merilee S. Grindle dari isi kebijakan menurut peneliti sudah sesuai, meskipun dari sisi lingkungan kebijakan atau konteks kebijakannya

masih belum maksimal terutama terhadap strategi dari actor yang terlibat dan tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana. Faktor pendukung dalam Implementasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Berbasis Kelapa Sawit di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Studi pada PT. Mustika Sembuluh) adalah anggaran program kemitraan perkebunan kelapa sawit antara pihak perusahaan dan koperasi, sumber daya manusia yang kompeten dalam program kemitraan perkebunan kelapa sawit, koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang bermitra, serta peran aktif lembaga RSPO (*Roundtable On Sustainable Palm Oil*) Dan FPP (*Forest Peoples Programme*). Sedangkan faktor penghambat dalam Implementasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Berbasis Kelapa Sawit di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Studi pada PT. Mustika Sembuluh) adalah terjadinya tumpang tindih kebijakan tumpang tindih kebijakan dikarenakan adanya dua atau lebih kebijakan yang dibuat mengalami kesamaan isi namun mengandung lubang/cela, kesiapan masyarakat terhadap program kemitraan yang masih kurang, dan proses perijinan lahan yang rumit.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam Implementasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Berbasis Kelapa Sawit di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Studi pada PT. Mustika Sembuluh) adalah terjadinya tumpang tindih kebijakan tumpang tindih kebijakan dikarenakan adanya dua atau lebih kebijakan yang dibuat mengalami kesamaan isi namun mengandung lubang/cela, kesiapan masyarakat terhadap program kemitraan yang masih kurang, dan proses perijinan lahan yang rumit.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan ini belum maksimal, dikarenakan terjadinya tumpang tindih kebijakan, kesiapan masyarakat masih kurang, dan proses perizinan lahan yang rumit. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperjelas aturan, kemudian membuat aturan tegas bagi anggota koperasi, untuk keterbatasan lahan dapat mengambil lahan yang telah digarap perusahaan atau menggunakan lahan milik masyarakat. Untuk memaksimalkan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, Pemerintah dapat melaksanakan sosialisasi, dan meninjau ulang laporan dari perusahaan terkait Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat dan menindak tegas yang tidak melaksanakan, serta melaksanakan pendampingan terkait Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, kemudian meninjau ulang terkait permasalahan lahan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Desa saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Berbasis Kelapa Sawit di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Studi pada PT. Mustika Sembuluh) untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Pondok Damar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Agustino, L., 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

II. Jurnal

Imang, N., Siti, B., & Maliki, 2016. *Analisis Implementasi Pola Kemitraan dan Pendapatan Petani Kebun Masyarakat Kelapa Sawit di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan timur*. Samarinda: Jurnal Pertanian Terpadu

Naifuli, S., Ndan, I., & Firda, J., 2017. *Analisis Kemitraan Petani Kebun Masyarakat Kelapa Sawit pada PT. Cahaya Anugerah Plantation di Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara*. Samarinda: Jurnal Ekonomi Pertanian & Pembangunan

Triani, 2020. *Implementasi Program Perusahaan Inti Rakyat kredit Koperasi Primer Anggota (Kkpa) Terhadap Pendapatan Anggota Petani Kebun Masyarakat Kelapa Sawit (Studi Kasus: Koperasi Unit Desa Cahaya Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal)*. Medan: UMSU Repository

Jimmy, N., 2013. *Analisis Implementasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan)*. Yogyakarta: Jurnal UMY

Victor, A., Hery, M.K., Rudy T, Yulianto, 2018. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Kebun Masyarakat Kelapa Sawit Pada PT. Agronusa Investama Di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak*. Bekasi: Jurnal Management UPB